

Forpimka Kangean Lakukan Patroli dan Pengecekan BBM, Antisipasi Kelangkaan Peralite

Achmad Sarjono - SUMENEP.WARTAWAN.ORG

Mar 31, 2026 - 16:59



Sumenep – Upaya mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Peralite di wilayah kepulauan terus dilakukan jajaran Polsek Kangean bersama Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Arjasa. Pada Selasa (31/3/2026), patroli dan pengecekan langsung digelar di sejumlah titik distribusi BBM, mulai dari tingkat APMS, sub agen hingga pengecer.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolsek Kangean, AKP Datun Subagyo, bersama personel Polsek Kangean, anggota Koramil Kangean 0827/18, serta perwakilan Kecamatan Arjasa.

Dalam patroli tersebut, tim menyasar sejumlah lokasi strategis, di antaranya APMS 01 milik H. Iksan di Desa Arjasa, APMS 03 milik H. Hosni, sub agen di Desa Kalikatak dan Desa Angkatan, serta para pengecer di wilayah Desa Bilis-Bilis Pangeran dan sekitarnya.

Dari hasil pengecekan, petugas masih menemukan adanya penjualan Pertalite di tingkat sub agen dan pengecer dengan harga yang melambung tinggi. Menindaklanjuti hal tersebut, petugas langsung memberikan imbauan tegas agar tidak melakukan penimbunan maupun menjual BBM di atas harga yang telah ditentukan.

Kapolsek Kangean AKP Datun Subagyo menegaskan bahwa pihaknya bersama Forpimka akan terus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas distribusi BBM di wilayah Kangean.

“Petugas mengimbau kepada seluruh pengelola APMS, sub agen, maupun pengecer agar menjual Pertalite sesuai harga yang telah ditetapkan serta tidak melakukan penimbunan. Apabila masih ditemukan pelanggaran, akan dilakukan pendataan dan penindakan lebih lanjut,” tegasnya.

Selain itu, pihak APMS juga diingatkan agar tidak menyimpan stok BBM secara berlebihan di sekitar lokasi guna menghindari potensi penyalahgunaan maupun gangguan keamanan.

Seluruh rangkaian kegiatan patroli dan pengecekan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Upaya ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga serta mencegah praktik spekulasi harga yang merugikan masyarakat.